

Warga Hinterland Minta Listrik 24 Jam

BATAM KOTA – Warga hinterland (pulau penyangga) masih belum bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh. Padahal kebutuhan akan listrik ini sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari warga pulau.

Sementara waktu guna memenuhi kebutuhan sementara warga hinterland akan listrik, PLN Batam akan memberikan bantuan mesin genset di empat pulau, di antaranya Pulau Temoyong, Batu Legong, Pantai Gelam dan Subang Mas, Galang.

“Kami dapat bantuan dari PLN empat mesin 40x80. Nantinya ini untuk membantu memenuhi kebutuhan di pulau-pulau yang belum memiliki sumber listrik,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Rabu (28/2).

Suasana senja di Pulau Akar, Kelurahan Bulang, Selasa (27/2). Warga hinterland di Batam masih belum bisa merasakan listrik 24 jam.



KORAN SINDO BATAM/JOKO SULISTYO

Bantuan ini akan diberikan langsung ke masyarakat. Bantuan diserahkan dengan catatan masyarakat menyiapkan lahan untuk meletakkan mesin dan

harus bertanggung jawab untuk perawatannya.

“Saya sudah meminta kepada camat untuk mengurus masalah hibah lahan sesegera

mungkin, agar cepat diberikan mesinnya. Saya minta copy-nya (salinan), nanti suratnya dibawa ke PLN,” ujarnya.

Ke hal 12))

Warga Hinterland...

((Dari hal 9

Rudi memberikan waktu empat pekan kepada camat dan lurah untuk urusan surat ini. Waktu dua pekan bagi warga siapkan surat hibah. Serta dua pekan lagi surat dari kelurahan serta kecamatan sebagai penguat. "Untuk kepentingan masyarakat harus disegerakan," katanya.

Sementara untuk penerangan listrik di Pulau Buluh yang saat ini hanya bisa menikmati penerangan saat malam hari. Wali Kota akan menanyakan langsung kepada PLN terkait hal itu. Ia berusaha semaksimal mungkin agar hal itu bisa terealisasi. "Saya akan undang PLN, namun belum bisa menjanjikan 24 jam. Kalau memang bisa diusahakan, kami akan tanyakan apa kendalanya," katanya.

Warga Pulau Buluh, Jamaludin berharap pulan yang men-

jadi tempat tinggalnya bisa teraliri listrik selama 24 jam. Sebab selama ini warga hanya bisa menikmati listrik hanya di siang hari, sedangkan siang hari warga mengandalkan genset milik pribadi.

"Pulau Buluh ini hanya lima menit dari Batam. Kenapa kami tak bisa merasakan listrik 24 jam penuh seperti mereka yang tinggal di Batam," ujarnya.

Pria paruh baya ini berharap dengan adanya aliran listrik dari PLN Batam dapat mengurangi beban mereka dalam mengeluarkan uang untuk kebutuhan listrik. Sehingga warga tak perlu lagi membeli solar untuk menyalakan genset bila membutuhkan listrik di siang hari. "Jadi cukup sekali bayar saja di PLN. Pasti dari segi biaya akan lebih murah," kata Jamaludin.

● **m arief rachman/
hendra zaimi**

Pass Pelabuhan Disatukan dengan Tiket Kapal

SEKUPANG – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerapkan Boarding Management System (BMS) di Pelabuhan Somestik Sekupang dan Telagapunggur yang berlaku mu-

lai, 1 Maret. Biaya boarding pass (pass penumpang) akan dimasukkan dalam harga tiket. Dengan penerapan sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan

kenyamanan penumpang.

“Tarifnya tetap Rp10 ribu, tapi akan include saat pembelian tiket. Jadi penumpang tak perlu lagi datang ke konter untuk

membayar pass pelabuhan,” kata Kepala Bidang Komersil Kantor Pelabuhan BP Batam, Djohan Efendy, Rabu (28/2).

Ke hal 12))

Pass Pelabuhan...

((Dari hal 9

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan terus dilakukan, karena itu BP Batam membuat terobosan-terobosan baru untuk membuat penumpang nyaman. Dengan penerapan BMS aturan pelayaran juga lebih terjamin. Sebab, data penumpang yang membeli tiket kapal akan terhubung langsung dengan sistem komputerisasi.

Setiap penumpang yang membeli tiket kapal feri akan diwajibkan mengisi data pribadi, seperti nama dan jenis kelamin. Dengan demikian pengelola kapal bisa memantau jumlah penumpangnya secara real time, saat itu juga. Meskipun tidak sedetail yang diterapkan di pesawat terbang, tapi cara ini diyakini sudah lebih baik jika dibandingkan sebelumnya karena penumpang kurang terdata.

"Di samping itu sistem ini juga memudahkan dari sisi pembayaran ke BP Batam untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelasnya.

Rencananya sistem ini akan mulai diterapkan Januari lalu, tapi karena ada beberapa kendala baru bisa diterapkan awal Maret. Pihaknya

akan melengkapi setiap agen kapal dengan komputer, printer, termasuk dari sisi jaringan, agen kapal tinggal menyiapkan kertas. Penerapan sistem ini juga akan mengurangi tatap muka antara pegawai BP Batam dengan para penumpang.

Djohan mengungkapkan, perbaikan juga dilakukan pada sistem pembayaran, di mana saat pembayaran tiket bisa dilakukan dengan uang elektronik (e-money). Meskipun tidak diwajibkan, agen kapal tidak boleh menolak masyarakat yang menggunakan e-money untuk membeli tiket kapal feri. Kebijakan ini juga sebagai salah satu dukungan terhadap program pemerintah.

"Kami akan berupa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan domestik. Minimal pelayanannya sama dengan pelabuhan feri internasional," jelasnya.

Untuk hari normal, penumpang kapal yang keluar dari Pelabuhan Sekupang maupun Telagapunggur masing-masing mencapai 2.000-4.000 orang. Jumlah ini meningkat mencapai 5.000 orang pada musim puncak. Seperti saat Lebaran, Natal dan Imlek.

● ahmad rohmadi

Bayar Pajak Kendaraan di Lokasi Razia

BATAM KOTA – Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam bersama Satlantas Polresta Barelang menggelar razia kendaraan penunggak pajak kendaraan bermotor di Kompleks Graha Rezeki Mas atau depan Edukits Batam Center, Rabu (28/2).

Pantauan *KORAN SINDO BATAM* selama razia yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga pukul 11.30, terlihat pengendara menuju Batam Centre dari arah Sekupang diarahkan masuk ke dalam pertokoan untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala KPPD Batam Teddy-mar mengatakan, tujuan razia untuk memberikan kepatuhan kepada pengendara untuk tertib pajak. Selama razia ini, juga disediakan mobil pelayanan Samsat Keliling agar pengendara yang terjaring dan pajaknya sudah tak berlaku lagi bisa langsung diperpanjang. "Jadi yang belum bayar pajak, bisa langsung membayarnya di tempat," ujarnya.

Kegiatan ini akan digelar sebanyak 12 kali kegiatan selama satu tahun dengan target 50

kendaraan minimal yang ditilang. Sedangkan bagi kendaraan yang tidak mempunyai kelengkapan SIM dan STNK akan langsung dibawa ke Polresta Barelang.

Wasakat Lantas Polresta Barelang AKP Kartijo mengatakan, razia merupakan bentuk dukungan Satlantas Polresta Barelang kepada pemerintah untuk menertibkan kendaraan yang belum membayar pajak. Selama razia puluhan kendaraan ditilang karena melanggar.

"Total ada 29 pengendara yang ditilang," ujarnya.

Adapun perincian pengendara yang ditilang, dua mobil, 10 motor, 9 pengendara tak membawa STNK dan 8 pengendara tak membawa SIM. Ia mengimbau kepada semua pengendara yang akan melakukan perjalanan, wajib untuk membawa kelengkapan dokumen kendaraan seperti membawa SIM, STNK dan juga taat membayar pajak.

● **tommy purniawan**

Satu Kelurahan Terima Rp1,2 Miliar

Pemko Naikkan Dana PIK Tahun 2019

BATAM KOTA – Dana Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) Kota Batam tahun 2019 naik menjadi Rp1,2 miliar. Meski jumlah tersebut belum cukup untuk mengakomodir pembangunan di setiap kelurahan, namun dana yang diberikan meningkat dibanding tahun sebelumnya hanya Rp1,1 miliar.

Pemko Batam nantinya akan menggelontorkan dana PIK sebesar Rp76.800.000.000 pada 2019 mendatang, dan dibagi rata kepada 64 kelurahan yang ada di Kota Batam. Wakil Wali Kota Amsakar Achmad mengatakan, dana PIK yang diberikan oleh pemerintah adalah salah satu upaya presentase belanja modal untuk pembangunan di seluruh daerah secara merata. Pembangunan infrastruktur bisa diajukan di musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Menurut dia, belanja tidak langsung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 tercatat Rp872 miliar atau 33 persen. "Sedangkan belanja langsung sebesar 67 persen atau Rp1,754 triliun. Perbandingannya 1:2," ujarnya di Batam Centre, (28/2).

Meski banyak pengajuan usulan pembangunan di musrenbang, pembangunan akan didahulukan yang lebih mendesak dan benar-benar kegiatan prioritas. Karena anggaran pemerintah pada dasarnya masih terbatas. "Kami mohon masyarakat agar apa yang diusulkan jangan ngotot. Harus didasarkan atas kemaslahatan banyak orang di kecamatan," kata Amsakar.

Dari sekian banyak program dan pembangunan yang diajukan pada musrenbang, akan diambil sepuluh prioritas di tingkat Kelurahan. Kemudian hasilnya akan dibicarakan di musrenbang tingkat kecamatan untuk penerusan keputusannya. "Jika di kecamatan ada empat kelurahan, berarti ada 40 usulan. Nantinya akan didahulukan yang mana men-

jadi prioritas dan kebutuhan mendesak bagi masyarakat," katanya.

Masyarakat diminta untuk menuliskan dengan benar lokasi PIK. Jangan sampai ada kesalahan penulisan hingga RT/RW. Karena kesalahan pengetikan malah mengganggu pelaksanaan pembangunan.

Selama ini penggunaan dana PIK memang masih fokus pada usulan-usulan mendesak, seperti pembangunan fasum, pemasangan batu miring untuk titik drainase lingkungan yang benar-benar sudah mengancam lingkungan, semenisasi ataupun peningkatan jalan lingkungan yang benar-benar dibutuhkan. "Dana yang dialokasikan ini terbatas. Mudah-mudahan wacana peningkatan dana PIK tahun 2019 bisa sedikit membantu kebutuhan yang belum terakomodir di tahun sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam akan turun ke lapangan untuk melihat langsung realisasi dana Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) tahun 2018. Hal itu dilakukan untuk memastikan pengerjaan dilakukan sesuai perencanaan yang telah disepakati bersama.



Program Semenisasi di kawasan Batam Centre, belum lama ini. Pemko Batam mengalokasikan Rp1,2 miliar dana PIK pada 2019 mendatang

"Sekalian meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tahun 2017 kepada seluruh kelurahan," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho di Batam Centre, Jumat (16/2).

Pihaknya juga akan memanggil seluruh lurah dan camat un-

tuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 pada triwulan pertama tahun ini. "Banyak juga pengaduan yang masuk terkait pergeseran anggaran khusus dalam bidang pembangunan jalan perumahan

ini," ujarnya.

Dia berharap seluruh camat dapat memberikan penjelasan terhadap pengerjaan semenisasi dari dana PIK ini. Selain itu, lanjut Tumbur, orang nomor satu di kecamatan ini juga harus bertanggungjawab jika terjadi penyelewengan dalam penggu-

naan anggaran nantinya. "Sekarang semua harus transparan tidak boleh ada ditutup-tutupi. Ini berlaku terhadap semua program yang ada di seluruh kecamatan, tidak hanya PIK," kata politisi PDIP ini.

● muhammad arief/
iwan sahaputra